

## Reforma Agraria Perkotaan: Dampak Penanganan Akses Terhadap Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng, Kota Surakarta, Jawa Tengah

**Isna Fajri**

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Indonesia  
[isnafajrisk@gmail.com](mailto:isnafajrisk@gmail.com)

**Dwi Wulan Pujiriyani**

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Indonesia  
[luciwulan@stp.ac.id](mailto:luciwulan@stp.ac.id)

**Rosye Villanova Christine**

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Indonesia  
[rosye.uq@gmail.com](mailto:rosye.uq@gmail.com)

### Suggested Citation:

Fajri, Isna; Pujiriyani, Dwi Wulan; & Christine, Rosye Villanova. (2024). Reforma Agraria Perkotaan: Dampak Penanganan Akses Terhadap Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng, Kota Surakarta, Jawa Tengah. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Volume 7, Nomor 2: –. <https://doi.org/10.15575/jt.v7i2.32458>.

### Article's History:

Received December 2023; Revised August 2024; Accepted August 2024.  
2024. [journal.uinsgd.ac.id](http://journal.uinsgd.ac.id) ©. All rights reserved.

### Abstract:

Poverty and slum settlements are major issues in urban areas. Agrarian reform, which includes asset restructuring and access management, is one effort to improve the welfare of the urban poor. Therefore, this paper aims to examine the impact of agrarian reform from the perspective of access management on community livelihood assets. This study focuses on the analysis of livelihood assets in Kampung Kenteng, Mojo Sub-district, Surakarta City, Central Java Province. The research employed a mixed-methods approach that combines quantitative and qualitative methods. The quantitative method was conducted through a survey of 75 respondents using a questionnaire, which was then analyzed using the asset pentagon approach—meanwhile, the qualitative method involved interviews with eight representatives from stakeholders involved in access management. The findings indicate that community livelihood assets have changed after access management interventions. Among the five types of livelihood assets, four have increased, while one has remained unchanged. The assets that have increased include financial assets, physical assets, natural resources, and social assets, while human resource assets have not changed.

**Keywords:** livelihood assets, poverty, social welfare, access management, urban agrarian reform.

### Abstrak:

Kemiskinan dan permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan utama di wilayah perkotaan. Reforma agraria, yang mencakup penataan aset dan penanganan akses, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin perkotaan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak reforma agraria dari perspektif penanganan akses terhadap aset penghidupan masyarakat. Kajian ini difokuskan pada analisis aset penghidupan masyarakat di Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan metode campuran yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 75 responden dengan menggunakan kuesioner, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan pentagon aset. Sementara itu, metode kualitatif dilakukan dengan wawancara terhadap delapan perwakilan dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam

penanganan akses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset penghidupan masyarakat mengalami perubahan setelah dilakukannya penanganan akses. Dari lima jenis aset penghidupan, terdapat empat aset yang mengalami peningkatan dan satu aset yang tidak mengalami perubahan. Aset yang mengalami peningkatan meliputi aset finansial, aset fisik, sumber daya alam, dan aset sosial, sementara aset yang tidak mengalami perubahan adalah aset sumber daya manusia.

**Kata Kunci:** aset penghidupan, kemiskinan, kesejahteraan sosial, penanganan akses, reforma agraria perkotaan.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan perkotaan di Indonesia merupakan masalah nasional yang memerlukan penanganan serius. Peningkatan urbanisasi, sebagaimana dinyatakan oleh Ardiansyah dalam Ekawati (2021), telah mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan, yang kemudian menciptakan kantong-kantong kemiskinan. Banyak penduduk yang tidak mampu membeli rumah di perkotaan terpaksa membangun tempat tinggal secara ilegal di lahan yang tersedia. Masalah agraria, terutama terkait legalitas tanah, menjadi salah satu isu utama yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan (Wijaya et al., 2016; Rachmasari et al., 2021; Farahdina & Purnama, 2022). Hal ini berdampak pada pemenuhan hak dasar mereka. Derasnya arus urbanisasi di kota-kota negara berkembang menyebabkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah semakin terdesak, memperluas kantong-kantong kemiskinan yang terlihat dari adanya permukiman kumuh dan padat penduduk di wilayah perkotaan.

Fenomena gentrifikasi turut memperburuk kondisi ini, di mana terjadi ketimpangan akses sumber daya antara kelompok kaya dan kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan (Buckley & Kalarickal, 2005; Payne & Durand-Lasserve, 2013). Gentrifikasi, sebagaimana dijelaskan oleh Lees, dkk. dalam (Tsuroyya, 2022), merupakan transformasi kawasan kosong di pusat kota menjadi area yang dihuni oleh kelompok kelas menengah atau digunakan untuk tujuan komersial. Proses ini menyebabkan masyarakat kelas bawah terdesak dan digantikan oleh kelompok ekonomi menengah atas. Akibatnya, masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki legalitas tanah terdorong untuk membangun permukiman di pinggiran atau pusat kota yang tidak tertata, yang pada akhirnya memunculkan permukiman kumuh.

Salah satu gambaran dari masalah agraria di perkotaan dapat dicermati di Kawasan Bekas Hak Pakai 00001/Mojo atau eks Hak Pakai 16/Semanggi. Kawasan ini ditinggali oleh masyarakat dengan membangun hunian liar sehingga memberikan kesan kurang tertata. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan kumuh di Kota Surakarta. Merujuk pada Keputusan Walikota Surakarta Nomor 640/69.9 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Surakarta, kawasan ini merupakan salah satu yang ditetapkan sebagai perumahan dan permukiman kumuh sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman secara tuntas dan berkelanjutan. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kriteria permukiman kumuh ini dapat dilihat dari kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran (Simanjuntak, 2022).

Dalam upaya penanganan masalah di perkotaan, muncul konsep yang dikenal sebagai reforma agraria (Kamim, 2022). Reforma agraria diperkenalkan sebagai solusi untuk mengatasi persoalan tanah dan pengelolaan sumber daya alam (Arisaputra, 2021). Sejak disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), reforma agraria dimulai melalui penataan dan redistribusi tanah pertanian, yang dikenal sebagai *landreform*. Pelaksanaan reforma agraria tidak hanya mencakup penataan aset, tetapi juga penataan akses. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, penataan akses mencakup pemberian kesempatan dalam bentuk akses permodalan maupun bantuan lainnya kepada subjek reforma agraria, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan tanah. Penataan akses ini dapat berupa fasilitasi permodalan, pembangunan sarana dan prasarana, serta pendidikan dan pelatihan (Mulyani, 2012; Suartina et al., 2012).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kota Surakarta melaksanakan program Penanganan Akses Reforma Agraria (ARA), yang melibatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis tanah. Sebagaimana dinyatakan oleh Kurnia & Insani (2020), pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria perkotaan menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, yang harus berhadapan dengan karakteristik kehidupan masyarakat perkotaan yang lebih beragam dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Keragaman dan kompleksitas kehidupan perkotaan ini sering kali memunculkan berbagai persoalan (Lasaiba, 2022). Pengaturan mengenai reforma agraria perkotaan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, khususnya pada Pasal 8 (b), yang mengatur tentang redistribusi tanah untuk non-pertanian.

Penelitian yang menggunakan pendekatan aset penghidupan telah banyak dilakukan sebelumnya, seperti oleh Wigati & Fitrianto (2013), Gai et al. (2020), dan Rachmawati & Latifa (2020). Meskipun penelitian-penelitian tersebut menggunakan pendekatan aset penghidupan, namun belum ada yang secara langsung mengaitkannya dengan reforma agraria. Studi Wigati & Fitrianto (2013) misalnya, menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis ketergantungan petani pada tengkulak melalui kegiatan keagamaan, di mana tengkulak dan pengijon menjadi sumber ketidakmakmuran petani. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Gai et al. (2020) mengeksplorasi kerentanan petani akibat bencana banjir yang menjadi ancaman bagi penghidupan mereka. Selanjutnya, studi Rachmawati & Latifa (2020) menyoroti pendekatan aset penghidupan dalam konteks adaptasi masyarakat di Delta Mahakam.

Meskipun ada studi yang secara khusus mengangkat tema reforma agraria, seperti yang dilakukan oleh Hastutiningsih et al. (2023) dan Augustina et al. (2024), penelitian-penelitian ini belum secara spesifik mengaitkan pelaksanaan reforma agraria di perkotaan dengan perubahan aset penghidupan. Studi Hastutiningsih et al., (2023) menggunakan pendekatan aset penghidupan dalam pelaksanaan reforma agraria, namun fokusnya pada masyarakat pesisir di Desa Ambulu dan kemitraan terkait program penanganan akses reforma agraria. Situasi kemiskinan yang dihadapi masyarakat pesisir berbeda dengan masyarakat perkotaan; di mana kemiskinan di daerah pesisir terkait dengan sumber mata pencaharian dari sumber daya perikanan/laut, sedangkan reforma agraria perkotaan lebih berkaitan dengan akses terhadap tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Studi oleh Augustina et al. (2024) juga menggunakan pendekatan aset penghidupan, tetapi lebih menekankan pada legalisasi aset di masyarakat perdesaan. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada pendekatan aset penghidupan yang diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan reforma agraria di perkotaan.

Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak program reforma agraria perkotaan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan pendekatan aset penghidupan. Fokus kajian dilakukan di kawasan bekas Hak Pakai 00001/Mojo (Kampung Kenteng), Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan utama: bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan program reforma agraria perkotaan?

Penelitian ini menjadi penting karena aset penghidupan, sebagaimana dijelaskan oleh Pradnyaswari et al., (2022), bermanfaat untuk mengidentifikasi kemampuan, kepemilikan, dan aktivitas yang diperlukan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Menurut Scoones (2015), aset penghidupan mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, finansial, fisik, dan sosial. Pertama, aset sumber daya alam adalah sumber daya yang dapat dikelola manusia dan berdampak pada kehidupannya. Kedua, aset sumber daya manusia mencakup kemampuan individu dalam memperoleh akses yang lebih baik terhadap kondisi penghidupan. Ketiga, aset finansial meliputi segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan dapat digunakan manusia untuk mencapai tujuan penghidupan. Keempat, aset fisik mencakup prasarana dan fasilitas yang dimiliki oleh rumah tangga untuk mempertahankan kehidupan. Kelima, aset sosial mencakup kekuatan untuk mengupayakan penghidupan melalui jaringan dan keterikatan sosial.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di kawasan bekas Hak Pakai 00001/Mojo (Kampung Kenteng), Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan memiliki profil spesifik dengan problem agraria di perkotaan di mana di lokasi ini sekaligus juga dilaksanakan program penataan perkotaan melalui KOTAKU dan juga penataan akses reforma agraria. Kawasan Bekas Hak Pakai 00001/Mojo atau yang dulunya Hak Pakai 16/Semanggi merupakan tanah Pemerintah Kota Surakarta yang terletak di Kampung Kenteng, Kelurahan Semanggi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*mix methods*) yang menurut Sugiyono (2016) merupakan kolaborasi antara metode kualitatif dan kuantitatif secara bersama-sama sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Strategi penelitian campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian campuran konkuren, yaitu menggabungkan antara data kuantitatif dan kualitatif dalam satu waktu. Data kuantitatif diperoleh melalui survei melalui penyebaran kuesioner. Sementara, data kualitatif diperoleh melalui wawancara. Data kuantitatif yang diambil dalam penelitian ini adalah keadaan aset penghidupan masyarakat Kampung Kenteng sebelum dan setelah Penanganan ARA. Keadaan aset penghidupan sebelum ARA terdiri dari keadaan sebelum pandemi pada tahun 2019 dan ketika pandemi pada tahun 2021 untuk

kemudian diambil rata-ratanya. Sementara, data kualitatif yang diambil adalah pendalaman program Penanganan ARA serta karakteristik lingkungan dan masyarakat Kampung Kenteng.

Responden dalam penelitian ini dipilih melalui teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) untuk memastikan bahwa seluruh responden adalah peserta program akses reforma agraria. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 75 sampel yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Sementara itu, wawancara dilakukan kepada delapan orang yang terdiri dari perwakilan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain: Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DP3AP2KB, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Wawancara dilakukan pada bulan Mei 2023. Selanjutnya, analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan pentagon aset penghidupan. Data hasil survei menggunakan kuesioner diolah melalui tabulasi dan dilakukan skoring yang hasilnya disajikan menggunakan tabel dan diagram serta pentagon aset penghidupan. Pentagon aset dibuat menggunakan perhitungan skor rata-rata tiap subvariabel dan variabel (Iskasari et al., 2020).

$$\begin{aligned}
 Ki &= \frac{X_t - X_r}{k} \\
 &= \frac{5 - 1}{5} \\
 &= \frac{4}{5} \\
 &= 0,8
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- Ki : Lebar interval
- Xt : Data tertinggi
- Xr : Data terendah
- K : Jumlah kategoris

Pentagon aset ialah melakukan penghitungan menggunakan nilai rata-rata dari masing-masing nilai aset penghidupan masyarakat (Dinanti et al., 2015). Dari penghitungan yang dilakukan, klasifikasi aset penghidupan dikategorikan menjadi 5, yaitu sangat rendah dengan skor 1-1, 8, rendah dengan skor 1, 9-2, 6, sedang dengan skor 2, 7-3, 4, tinggi dengan skor 3, 5-4, 2, dan sangat tinggi dengan skor 4, 3-5. Lima klasifikasi tersebut berdasarkan parameter aset penghidupan pada tabel 1. Aset SDM terdiri dari variabel pendidikan, jumlah anggota keluarga dan jumlah anggota keluarga berusia produktif. Aset finansial terdiri dari pendapatan, pengeluaran, pembiayaan kebutuhan pokok, dan pembiayaan kesehatan. Aset fisik terdiri dari status tempat tinggal, kepemilikan alat transportasi dan akses jalan. Aset SDA terdiri dari akses air, dan kebersihan lingkungan. Terakhir, aset sosial terdiri dari partisipasi organisasi, pemberdayaan masyarakat dan keamanan lingkungan.

**Tabel 1.** Variabel Penelitian

| Aset      | Sub Variabel                              | Indikator                                      |
|-----------|---|--|
| SDM       | Pendidikan                                | Tingkat pendidikan masyarakat                  |
|           | Jumlah Anggota Keluarga                   | Banyaknya anggota dalam 1 rumah tangga         |
|           | Jumlah Anggota Keluarga Berusia Produktif | Banyaknya anggota keluarga berusia 15-64 tahun |
| Finansial | Pendapatan                                | Rata-rata tingkat pendapatan masyarakat        |
|           | Pengeluaran                               | Rata-rata tingkat pengeluaran masyarakat       |
|           | Pembiayaan Kebutuhan Pokok                | Kemudahan dalam pembiayaan kebutuhan pokok     |
|           | Pembiayaan Kesehatan                      | Kemudahan dalam pembiayaan kesehatan           |
| Fisik     | Status Tempat Tinggal                     | Status kepemilikan rumah                       |
|           | Kepemilikan Alat Transportasi             | Jenis kendaraan yang dimiliki                  |
|           | Akses Jalan                               | Jenis jalan di lingkungan tempat tinggal       |
| SDA       | Akses Air                                 | Kemudahan dalam mengakses air bersih           |
|           | Kebersihan Lingkungan                     | Tingkat kebersihan lingkungan tempat tinggal   |
| Sosial    | Partisipasi Organisasi                    | Tingkat keaktifan dalam organisasi             |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Pemberdayaan Masyarakat | Tingkat keaktifan dalam pemberdayaan masyarakat |
| Keamanan Lingkungan     | Tingkat keamanan lingkungan                     |

Sumber: Diolah dari Ellis (2004)

Dalam penelitian ini, analisis kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan penyusunan transkrip wawancara yang dilakukan terhadap delapan pemangku kepentingan terkait. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk teks naratif yang bertujuan untuk mendukung dan memperkuat analisis kuantitatif yang telah dilakukan. Selain itu, analisis kualitatif ini juga melibatkan pengidentifikasian tema-tema kunci yang muncul selama wawancara, serta pengkategorian informasi berdasarkan relevansinya terhadap tujuan penelitian. Hasil dari analisis ini diintegrasikan dengan data kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak program reforma agraria perkotaan terhadap aset penghidupan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Reforma Agraria Perkotaan di Kawasan Bekas Hak Pakai 00001/Mojo di Kota Surakarta

Program Akses Reforma Agraria merupakan program dari Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (Natadireja et al., 2024). Pada tahun 2022, Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kota Surakarta melaksanakan program Penanganan Akses Reforma Agraria di Kota Surakarta. Akses Reforma Agraria di Kota Surakarta pada tahun 2022 dilaksanakan di Kawasan Bekas Hak Pakai 00001/Mojo yang terletak di Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo. Program Penanganan Akses Reforma Agraria di kawasan ini dilakukan setelah adanya Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan penataan lingkungan sekaligus penataan aset bagi masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan hak milik atas tanah yang sudah tertata serta bangunan rumah.

Program KOTAKU merupakan kebijakan yang diambil oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) sebagai lanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 (Kamil et al., 2021). Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Surakarta bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta melaksanakan program KOTAKU untuk melakukan penataan terhadap kawasan Hak Pakai 00001/Mojo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman di lokasi tersebut. Melalui program KOTAKU, dilakukan pembangunan rumah yang diberikan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di lahan tersebut. Dalam hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kota Surakarta mendukung dalam penataan aset berupa pensertipikatan tanah.

Setelah adanya penataan di lingkungan kumuh, perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dilaksanakan Akses Reforma Agraria. Adapun bentuk kegiatan dalam Akses Reforma Agraria yang dilakukan adalah pelatihan teknis berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan serta kemandirian masyarakat, meliputi pelatihan BUDIKDAMBER (Budidaya Ikan dan Tanaman dalam Ember), pelatihan kuliner, pembuatan kebun sayur, dan penyuluhan kepada orang tua dan anak.

“Fungsi Disperpangtan pada tim RA adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program pemberdayaan melalui penataan lingkungan hidup, pemanfaatan lahan pekarangan dengan memanfaatkan penanaman tanaman-tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, dan usaha perikanan dengan budidaya ikan dalam ember atau BUDIKDAMBER. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Disperpangtan untuk pendampingan, penyuluhan, pemeliharaan, sampai dengan perawatan. Selain itu, diberikan bantuan sarana prasarana dalam bentuk kolam plastik maupun kolam ember. Untuk sisi pertanian diberikan bibit sayuran, pupuk, dan pendampingan terkait cara berbudidaya tanaman sampai pengelolaan hasilnya (SHT, Wawancara, 26 Mei, 2023).

Pada program Penanganan ARA tahun 2022, Kantor Pertanahan Kota Surakarta bekerja sama dengan beberapa lembaga. Lembaga yang berperan secara langsung dalam program ini meliputi Dinperten KPP Kota Surakarta, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, Disperum KPP Kota Surakarta, DP3AP2KB Kota Surakarta, Pemerintah Kelurahan Mojo, Pokja Hak Pakai 00001/Mojo, dan Perumda BPR Bank Solo Kota



Surakarta. Sementara, lembaga yang tergabung dalam program, tetapi tidak berperan secara aktif dalam ARA, yaitu DPMPTSP Kota Surakarta, Bappeda Kota Surakarta, dan BPKAD Kota Surakarta.

### Kondisi Aset Penghidupan Masyarakat Sebelum Pelaksanaan Reforma Agraria Perkotaan

Aset penghidupan merupakan aset yang dinilai maupun yang tidak dinilai berupa materi maupun sosial yang dipergunakan manusia untuk menyelenggarakan penghidupan (Krantz, 2001). Berdasarkan *Department for International Development* (DFID), terdapat lima kategori aset yang digunakan untuk penghidupan, yaitu aset sumber daya manusia, finansial, fisik, sumber daya alam, dan sosial (Aranda-Jan et al., 2020).

Masyarakat kawasan bekas Hak Pakai 00001/Mojo sebagian besar merupakan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah dengan penghasilan di bawah rata-rata Upah Minimum Kota (UMK) Surakarta. Kegiatan masyarakat terpusat pada sektor perdagangan dan industri. Lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berawal dari permukiman ilegal karena menempati lahan hak pakai milik pemerintah mengakibatkan lingkungan ini terlihat kumuh (Wasita, 2022). Masyarakat di kawasan bekas Hak Pakai 00001/Mojo, hidup dan melangsungkan penghidupannya, dengan bertumpu pada aset-aset penghidupan yang ragam yaitu: aset sumber daya alam dan lingkungan, sosial kapital, finansial kapital serta sumber daya manusia. Hasil dari penggunaan aset-aset inilah yang kemudian disebut sebagai 'platform penghidupan' atau seringkali juga disebut sebagai portofolio aset (Saragih et al., 2007). Adapun aset penghidupan masyarakat Kampung Kenteng sebelum Penanganan ARA dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng Sebelum Penanganan ARA

| Variabel                   | Sub Variabel                    | 2019              |            |               |            | 2021              |            |               |            |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                 | Skor Sub Variabel | Persentase | Skor Variabel | Persentase | Skor Sub Variabel | Persentase | Skor Variabel | Persentase |
| SDM                        | Pendidikan                      | 2,7               | 54%        | 3.1           | 63%        | 2.7               | 54%        | 3.1           | 63%        |
|                            | Jumlah Anggota Keluarga         | 3                 | 60%        |               |            | 3                 | 60%        |               |            |
|                            | Anggota Keluarga Usia Produktif | 3,7               | 74%        |               |            | 3.7               | 74%        |               |            |
|                            | Pendapatan                      | 2,5               | 50%        |               |            | 3.1               | 62%        |               |            |
| Pengeluaran                | 2,6                             | 52%               | 2.5        | 50%           |            |                   |            |               |            |
| Pembiayaan Kebutuhan Pokok | 3,3                             | 66%               | 2.6        | 52%           |            |                   |            |               |            |
| Pembiayaan Kesehatan       | 4                               | 80%               | 3.9        | 78%           |            |                   |            |               |            |
| Fisik                      | Status tempat tinggal           | 4,5               | 90%        | 3.3           | 65%        | 4.97              | 99%        | 3.6           | 72%        |
|                            | Kepemilikan alat transportasi   | 2,9               | 58%        |               |            | 2.9               | 58%        |               |            |
|                            | Akses jalan                     | 2,4               | 48%        |               |            | 3                 | 60%        |               |            |
| SDA                        | Akses Air                       | 4,4               | 88%        | 3.7           | 73%        | 3,6               | 72%        | 4.1           | 82%        |
|                            | Kebersihan lingkungan           | 2,9               | 58%        |               |            | 4,6               | 92%        |               |            |
| Sosial                     | Partisipasi Organisasi          | 2,1               | 42%        | 2.3           | 46%        | 2.1               | 42%        | 2.6           | 51%        |
|                            | Pemberdayaan Masyarakat         | 1                 | 20%        |               |            | 1                 | 20%        |               |            |
|                            | Keamanan Lingkungan             | 3,9               | 78%        |               |            | 4,6               | 92%        |               |            |

n: 75

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2023.

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 2, penulis menjabarkan hasil analisis secara rinci untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait pengaruh program reforma agraria terhadap aset penghidupan masyarakat di kawasan Kampung Kenteng, yakni sebagai berikut.

*Pertama, aset sumber daya manusia.*

Aset sumber daya manusia menunjukkan keadaan atau kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Sebagaimana disebutkan Ellis (1999), kemiskinan berasosiasi dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya keahlian. Subvariabel aset sumber daya manusia yang digunakan dalam penelitian di Kampung Kenteng adalah tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan jumlah anggota keluarga yang berusia produktif. Sebagian besar masyarakat Kampung Kenteng mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA, yaitu sebesar 32% (24 orang). Meskipun demikian, masih terdapat 16% (12 orang) masyarakat yang tidak bersekolah atau tidak lulus SD. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mengakibatkan sebagian besar masyarakat kampung ini bermata pencaharian pada sektor informal. Sektor informal adalah kegiatan ekonomi yang bersifat marginal (kecil-kecilan) karena aktivitasnya tidak teratur, tidak ada peraturan, berdiri sendiri, berlaku di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengenal sistem perbankan maupun perkreditan (Astuti & Asnawi, 2014).

Sebanyak 32% (24 keluarga) memiliki 4 orang anggota. Akan tetapi, terdapat 5% (4 keluarga) yang hanya terdiri dari satu orang. Keluarga yang hanya beranggotakan 1 dan 2 orang di Kampung Kenteng sebagian besar merupakan masyarakat lanjut usia yang anak-anaknya telah berkeluarga, telah cerai, atau pasangannya telah meninggal. Banyaknya anggota keluarga tidak menjamin suatu keluarga menjadi lebih sejahtera. Jumlah anggota yang berusia produktif juga turut berperan sebagai salah satu faktor dalam kesejahteraan keluarga. Sebanyak 31% (23 rumah tangga) masyarakat di Kampung Kenteng memiliki anggota berusia produktif sebanyak 2 orang. Dengan demikian, sebagian besar keluarga masih memiliki tulang punggung untuk memperoleh pendapatan.

Aset sumber daya manusia dari tahun 2019 tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, skor aset sumber daya manusia pada tahun 2021 sama dengan tahun 2019, yaitu sebesar 3,1. Skor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Kenteng sebelum Penanganan ARA memiliki aset sumber daya manusia yang termasuk sedang.

*Kedua, aset finansial.*

Aset finansial penelitian ini menggunakan subvariabel pendapatan, pengeluaran, kemudahan pembiayaan kebutuhan pokok, dan kemudahan pembiayaan kesehatan. Sebagian besar masyarakat Kampung Kenteng memiliki pekerjaan di bidang usaha informal, yaitu berdagang. Dari pekerjaan tersebut, penghasilan sebanyak 33% (25 rumah tangga) responden pada tahun 2019 setiap bulannya menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1.100.000,00 - 2.000.000,00. Sementara, ketika pandemi pada tahun 2021, sebanyak 55% (41 rumah tangga) mendapatkan penghasilan sebesar Rp0,00 hingga Rp 1.000.000,00 dari pekerjaan yang ditekuni. Hal itu dikarenakan pandemi yang mengakibatkan kegiatan masyarakat terbatas atau bahkan terhenti secara total.

Pengeluaran biaya hidup untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam penelitian ini dilihat dari beberapa kebutuhan, yaitu biaya makan, transportasi, pendidikan, kesehatan, listrik, biaya sosial, dan biaya sewa rumah. Sebanyak 45% (34 rumah tangga) masyarakat Kampung Kenteng memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan dalam satu bulan sebesar Rp 1.100.000,00 – Rp 2.000.000,00. Ketika pandemi tahun 2021, sebanyak 47% (35 rumah tangga) pada tahun 2021 memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok sebesar Rp 1.100.000,00 – Rp 2.000.000,00 setiap bulannya.

Kebutuhan pokok menjadi hal yang penting dalam kehidupan. Sebanyak 53% (40 rumah tangga) masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2019 mengalami tingkat kemudahan pembiayaan kebutuhan pokok yang sedang. Meskipun demikian, masih terdapat 1% (1 rumah tangga) masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Akan tetapi, ketika pandemi pada tahun 2021, terdapat 15% (11 rumah tangga) yang mengalami keadaan sangat sulit dalam pembiayaan kebutuhan pokok.

Kemudahan pembiayaan kesehatan pada 40% (30 rumah tangga) masyarakat Kampung Kenteng sebagian besar tergolong mudah. Masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam pembiayaan kesehatan karena memiliki akses jaminan kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat. Hal serupa ketika tahun 2021, meskipun terdapat pandemi, masyarakat tetap dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa mengalami kesulitan pembiayaan.

Aset finansial masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2019 jika dilihat dari empat indikator tersebut memiliki rata-rata sebesar 3,1. Sementara pada tahun 2021, skor aset finansial sebesar 2,7. Dari dua skor tersebut, maka skor aset finansial sebelum Penanganan ARA sebesar 2,9 yang termasuk sedang.

*Ketiga, aset fisik.*

Aset fisik dalam penelitian ini menggunakan subvariabel status tempat tinggal, kepemilikan kendaraan, dan akses jalan. Pada tahun 2019, masyarakat Kampung Kenteng, khususnya Kawasan Hak Pakai 00001/Mojo menempati tempat tinggal yang ilegal. Sebanyak 77% (58 rumah tangga) masyarakat Kampung Kenteng pada tahun tersebut bertempat tinggal di rumah milik sendiri meskipun berada di atas tanah dengan Hak Pakai milik Pemerintah Kota Surakarta. Pada tahun 2021 sebanyak 99% (74 rumah tangga) status tempat tinggal responden adalah milik sendiri. Hal tersebut dikarenakan pada tahun ini di kawasan bekas Hak Pakai 00001/Mojo dilaksanakan Program KOTAKU berupa penataan permukiman kumuh dan dilakukan persertipikatan tanah bagi masyarakat yang di atasnya dibangun rumah.

Untuk menunjang kegiatan, masyarakat Kampung Kenteng menggunakan alat transportasi. Motor merupakan kendaraan yang dominan dimiliki oleh masyarakat Kampung Kenteng, yaitu sebanyak 87% (65 rumah tangga). Akan tetapi, terdapat 4% (3 rumah tangga) yang tidak memiliki kendaraan. Ketika pandemi tahun 2021, masyarakat yang memiliki alat transportasi berupa motor sebanyak 88% (66 rumah tangga). Hal tersebut tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

Sebanyak 55% (41 rumah tangga) masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2019 memiliki akses jalan non-aspal. Sementara, terdapat 11% (8 rumah tangga) dengan akses jalan jenis aspal, yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tepi jalan raya. Jenis jalan yang menjadi akses masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2021 sebanyak 100% (75 rumah tangga) adalah paving yang dibuat dalam Program KOTAKU.

Dari empat indikator tersebut, dapat diketahui bahwa skor aset fisik pada masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2019 sebesar 3,3. Sedangkan, pada tahun 2021 sebesar 3,6. Dari dua skor tersebut, maka skor aset fisik sebelum Penanganan ARA sebesar 3,4 yang termasuk sedang.

*Keempat, aset sumber daya alam.*

Sebanyak 60% (45 rumah tangga) masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2019 termasuk sangat mudah terkait kemudahan akses terhadap air. Masyarakat menggunakan sumur sebagai sumber air untuk kegiatan rumah tangga berupa mencuci dan mandi. Sementara untuk memasak dan minum, masyarakat menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dengan demikian, kebutuhan akan air mudah terpenuhi. Selain itu, kemudahan akses masyarakat terhadap air dikarenakan kawasan tersebut berada di dekat Sungai Bengawan Solo. Pada tahun 2021 ketika pandemi, akses masyarakat terhadap air termasuk mudah yang ditunjukkan oleh sebanyak 40% (30 rumah tangga) masyarakat yang dapat mengakses air dengan mudah. Akan tetapi, terdapat 9% (7 rumah tangga) masyarakat yang termasuk dalam kategori sulit dalam mengakses air. Hal tersebut dikarenakan pada lokasi penataan, air dari PDAM tidak mengalir untuk wilayah pembangunan tahap 1. Dengan demikian, masyarakat membuat sumur pribadi untuk mempermudah dalam mendapatkan air.

Kampung Kenteng merupakan kawasan kumuh yang ditetapkan sebagai kawasan yang perlu dilakukan penataan untuk mengurangi permukiman kumuh di Kota Surakarta. Pada tahun 2019, jumlah masyarakat yang masih menempati lingkungan yang termasuk dalam kategori kotor terdapat 21% (16 rumah tangga). Masyarakat yang tinggal di lingkungan sangat kotor atau kumuh sebanyak 7% (5 rumah tangga) adalah keluarga yang letak tempat tinggalnya di tepi sungai. Pada tahun 2021 lingkungan tempat tinggal 64% (48 rumah tangga) termasuk sangat bersih. Hal ini dikarenakan lingkungan tersebut telah dilakukan penataan kawasan.

Skor pada aset sumber daya alam pada tahun 2019 sebesar 3,7. Sementara, pada tahun 2021 sebesar 4,1. Dari dua skor aset tersebut, maka skor aset sumber daya alam sebelum Penanganan ARA sebesar 3,9 yang termasuk tinggi.

*Kelima, aset sosial.*

Sebelum Kampung Kenteng mengalami penataan kawasan, masyarakat masih bertempat tinggal secara ilegal. Hal ini berdampak pada kesulitan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam organisasi. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat belum memiliki partisipasi dalam organisasi. Sebagian besar masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2019, yaitu sebesar 71% (53 orang) tidak berpartisipasi dalam organisasi serta tidak mengetahui adanya organisasi masyarakat di lingkungan tersebut. Pada saat pandemi tahun 2021, tingkat partisipasi masyarakat dalam organisasi sama dengan tahun 2019.

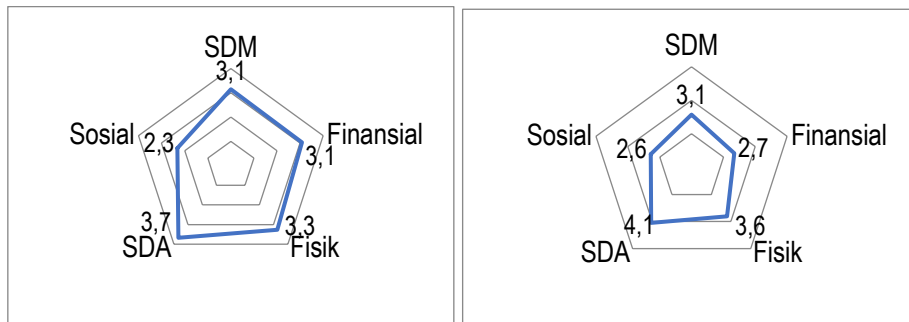
Pada tahun 2019, sebanyak 100% (75 orang) responden tidak mendapatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya dari ATR/BPN. Hal demikian juga terjadi pada saat pandemi tahun 2021. Keamanan suatu lingkungan dapat dipengaruhi dari faktor luar maupun dalam, yaitu dari masyarakat di kawasan tersebut ataupun masyarakat dari luar kawasan tersebut. Tingkat keamanan di suatu wilayah menjadi salah satu faktor kesejahteraan warganya. Sebanyak 4% (3 rumah tangga) bertempat tinggal di lingkungan yang sangat tidak aman. Sementara, 36% (27 rumah tangga) masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2019 tinggal di lingkungan yang termasuk aman.



Adanya kegiatan penataan melalui KOTAKU juga membawa perubahan terkait keamanan lingkungan. Sebanyak 68% (51 rumah tangga) memiliki lingkungan tempat tinggal yang tergolong sangat aman.

Dari tiga indikator tersebut, dapat diketahui bahwa skor aset sosial masyarakat Kampung Kenteng sebesar 2,3. Sementara, pada tahun 2021 sebesar 2,6. Dari dua skor tersebut, maka skor aset sosial masyarakat Kampung Kenteng sebelum Penanganan ARA sebesar 2,4 yang menunjukkan bahwa aset sosial masyarakat termasuk rendah.

**Gambar 1.** Pentagon Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng Tahun 2019 dan 2021



**Sumber:** Diolah dari Hasil Penelitian, 2023.

Jika dilihat dari keadaan aset penghidupan masyarakat sebelum dan setelah pandemi, maka aset penghidupan masyarakat Kampung Kenteng sebelum Penanganan ARA dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3.** Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng Sebelum Penanganan ARA

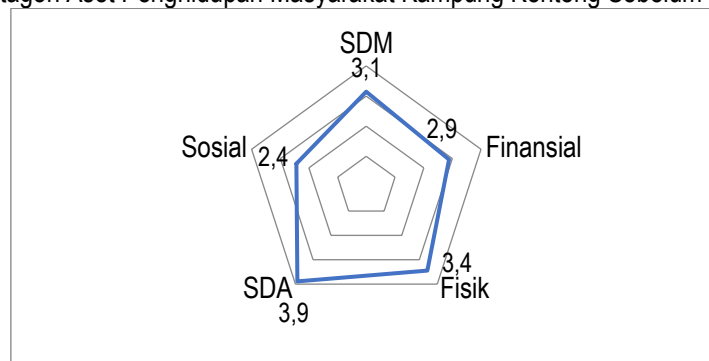
| Aset      | Skor | Persentase |
|-----------|------|------------|
| SDM       | 3.1  | 63%        |
| Finansial | 2.9  | 58%        |
| Fisik     | 3.4  | 69%        |
| SDA       | 3.9  | 78%        |
| Sosial    | 2.4  | 49%        |

*n*: 75

**Sumber:** Diolah dari Hasil Penelitian, 2023.

Tabel 3 menunjukkan bahwa aset penghidupan masyarakat Kampung Kenteng sebelum adanya Penanganan ARA dominan pada aset sumber daya alam sebesar 4,9 (78%) yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sementara, aset dengan nilai terendah adalah aset sosial sebesar 2,4 (49%) yang termasuk dalam kategori rendah. Adapun aset penghidupan masyarakat Kampung Kenteng sebelum Penanganan ARA apabila dituangkan dalam pentagon aset dapat dilihat pada Gambar 2.

**Gambar 2.** Pentagon Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng Sebelum Penanganan ARA



Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2023

**Kondisi Aset Penghidupan Masyarakat Setelah Pelaksanaan Reforma Agraria Perkotaan**

Program Penanganan Akses Reforma Agraria di Kampung Kenteng dilaksanakan pada tahun 2022. Dengan adanya program tersebut, kondisi penghidupan masyarakat mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Adapun aset penghidupan masyarakat Kampung Kenteng setelah Penanganan ARA dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4.** Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng Setelah Penanganan ARA

| Variabel  | Sub Variabel                    | Skor | Persentase | Skor Variabel | Persentase |
|-----------|---------------------------------|------|------------|---------------|------------|
| SDM       | Pendidikan                      | 2.7  | 54%        | 3.1           | 63%        |
|           | Jumlah Anggota Keluarga         | 3.0  | 60%        |               |            |
|           | Anggota Keluarga Usia Produktif | 3.7  | 74%        |               |            |
| Finansial | Pendapatan                      | 2.7  | 53%        | 3.1           | 63%        |
|           | Pengeluaran                     | 2.5  | 50%        |               |            |
|           | Pembiayaan Kebutuhan Pokok      | 3.5  | 69%        |               |            |
|           | Pembiayaan Kesehatan            | 3.9  | 79%        |               |            |
| Fisik     | Status tempat tinggal           | 5.0  | 100%       | 3.6           | 73%        |
|           | Kepemilikan alat transportasi   | 2.9  | 58%        |               |            |
|           | Akses jalan                     | 3.0  | 60%        |               |            |
| SDA       | Akses Air                       | 3.7  | 74%        | 4.3           | 86%        |
|           | Kebersihan lingkungan           | 4.9  | 98%        |               |            |
| Sosial    | Partisipasi Organisasi          | 4.7  | 93%        | 4.7           | 94%        |
|           | Pemberdayaan Masyarakat         | 4.7  | 93%        |               |            |
|           | Keamanan Lingkungan             | 4.9  | 97%        |               |            |

n: 75

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2023.

*Pertama*, aset sumber daya manusia.

Aset sumber daya manusia dari tahun 2019 tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu masyarakat kawasan tersebut sebagian besar telah berusia melebihi 50 tahun serta tidak melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat pun tetap. Selain itu, jumlah anggota keluarga tidak mengalami pertambahan. Oleh karena itu, skor aset ini pada tahun 2021 dan 2023 sama dengan tahun 2019, yaitu sebesar 3,1. Skor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Kenteng memiliki aset sumber daya manusia yang termasuk sedang. Adanya Penanganan ARA tidak memberikan perubahan terhadap aset sumber daya manusia di kampung ini.

*Kedua*, aset finansial.

Pendapatan masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2023 sebagian besar Rp 1.100.000,00 – Rp 2.000.000,00 yang diperoleh sebanyak 33% (25 rumah tangga) masyarakat. Masyarakat dengan pendapatan yang tergolong sangat tinggi, yaitu Rp 4.100.000,00 – Rp 5.000.000,00 sebanyak 17% (13 rumah tangga). Masyarakat

Kampung Kenteng sebagian besar mengeluarkan biaya untuk kebutuhan setiap bulan sebanyak Rp 1.100.000,00 – Rp 2.000.000,00. Jumlah masyarakat dengan pengeluaran tersebut sebanyak 48% (36 rumah tangga). Tingkat kemudahan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2023 sebagian besar tergolong sedang. Sebanyak 45% (34 rumah tangga) masyarakat termasuk dalam kategori tersebut. Meskipun demikian, terdapat 1% (1 rumah tangga) masyarakat yang mengalami keadaan sangat sulit dalam pembiayaan kebutuhan pokok sulit dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Kemudahan pembiayaan kesehatan pada masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2023 sebagian besar tergolong mudah yang dialami oleh 39% (29 rumah tangga) masyarakat. Masyarakat yang dalam pembiayaan kesehatannya tergolong sangat mudah sebanyak 25% (19 rumah tangga). Rata-rata skor kemudahan pembiayaan kesehatan pada tahun 2021 adalah 3,94 yang menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan masyarakat di Kampung Kenteng rata-rata termasuk mudah. Aset finansial masyarakat Kampung Kenteng jika dilihat dari empat subvariabel tersebut dapat diketahui sebesar 3,1. Skor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2023 memiliki aset finansial yang termasuk dalam kategori sedang.

*Ketiga, aset fisik.*

Status tempat tinggal masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2023 sebanyak 100% (75 rumah tangga) adalah milik sendiri, yaitu rumah yang dibangun dari Program KOTAKU. Seluruh masyarakat telah tinggal di rumah milik sendiri di atas tanah hak milik. Rata-rata skor status tempat tinggal di Kampung Kenteng adalah 5. Kepemilikan alat transportasi masyarakat Kenteng pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun 2021. Kendaraan yang mendominasi di Kampung Kenteng adalah motor dengan persentase 88% (66 rumah tangga) memiliki kendaraan berupa motor, yaitu sejumlah 66 keluarga. Jenis jalan di Kampung Kenteng pada tahun 2023 sama dengan tahun 2021, yaitu dengan bahan jalan berupa paving. Sebanyak 100% (75 rumah tangga) masyarakat bertempat tinggal dengan akses jalan yang berupa paving. Dari tiga subvariabel tersebut, dapat diketahui bahwa skor aset fisik masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2023 sebesar 3,6. Skor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Kenteng memiliki aset fisik yang termasuk tinggi.

*Keempat, aset sumber daya alam.*

Sebagian besar masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2023, yaitu sebanyak 39% (29 rumah tangga) tergolong mendapatkan akses yang mudah terhadap air. Meskipun demikian, terdapat 1% (1 rumah tangga) yang termasuk dalam kategori sulit terkait akses air. Sebanyak 92% (69 rumah tangga) masyarakat Kenteng menempati lingkungan yang termasuk dalam kategori sangat bersih pada tahun 2023. Sementara, 7% (5 rumah tangga) memiliki lingkungan yang bersih. Dengan demikian, hampir seluruh lingkungan Kampung Kenteng pada tahun 2023 memiliki kualitas kebersihan yang baik meskipun masih terdapat 1% (1 rumah tangga) yang menempati lingkungan dengan kebersihan tergolong sedang. Pada tahun 2023 tidak terdapat lingkungan tempat tinggal masyarakat yang kotor atau kumuh. Rata-rata skor aset ini adalah 3,7 yang menunjukkan bahwa aset sumber daya alam di Kampung Kenteng pada tahun 2023 termasuk tinggi.

*Kelima, aset sosial.*

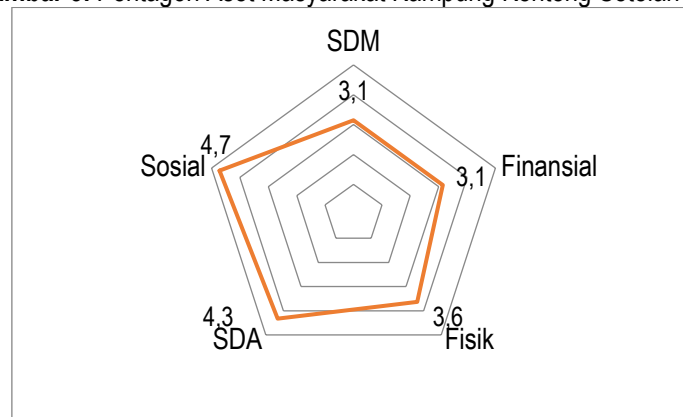
Adanya Penanganan Akses Reforma Agraria di Kampung Kenteng memberikan perubahan terkait keadaan sosial masyarakat. Sebanyak 83% (62 orang) masyarakat pada tahun 2023 aktif dalam kegiatan berorganisasi. Meskipun demikian, terdapat 7% (5 orang) yang tidak aktif dalam organisasi masyarakat. Program Penanganan ARA memberikan pemberdayaan masyarakat di Kampung Kenteng. Dengan adanya program tersebut, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat mengalami perubahan. Pada tahun 2023, sebanyak 84% (63 orang) masyarakat mendapatkan pemberdayaan masyarakat dari ATR/BPN. Akan tetapi, masih ada sebanyak 7% (5 orang) masyarakat yang tidak aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Keamanan lingkungan tempat tinggal masyarakat Kenteng pada tahun 2023 sebagian besar tergolong sangat aman. Sebanyak 93% (70 rumah tangga) menempati tempat tinggal yang sangat aman. Namun, terdapat 4% (3 rumah tangga) dengan lingkungan tempat tinggal yang tergolong tidak aman. Hal tersebut ditandai dengan adanya keluhan masyarakat terkait adanya pencurian. Dari tiga indikator tersebut, dapat diketahui bahwa skor aset sosial masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2023 sebesar 4,7. Skor tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, masyarakat Kampung Kenteng memiliki aset sosial yang sangat tinggi.

Aset penghidupan masyarakat Kampung Kenteng setelah Penanganan ARA dominan pada aset sosial dengan skor sebesar 4,7. Skor 4,7 menunjukkan bahwa aset sosial di Kampung Kenteng pada tahun 2023 termasuk sangat tinggi. Sementara aset yang memiliki skor paling rendah adalah aset finansial dengan besar skor

3,14. Skor yang diperoleh pada aset ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Kenteng pada tahun 2023 memiliki aset finansial yang termasuk sedang. Adapun keadaan masyarakat pada tahun 2023 apabila dituangkan dalam pentagon aset dapat dilihat pada Gambar 3.

**Gambar 3.** Pentagon Aset Masyarakat Kampung Kenteng Setelah ARA

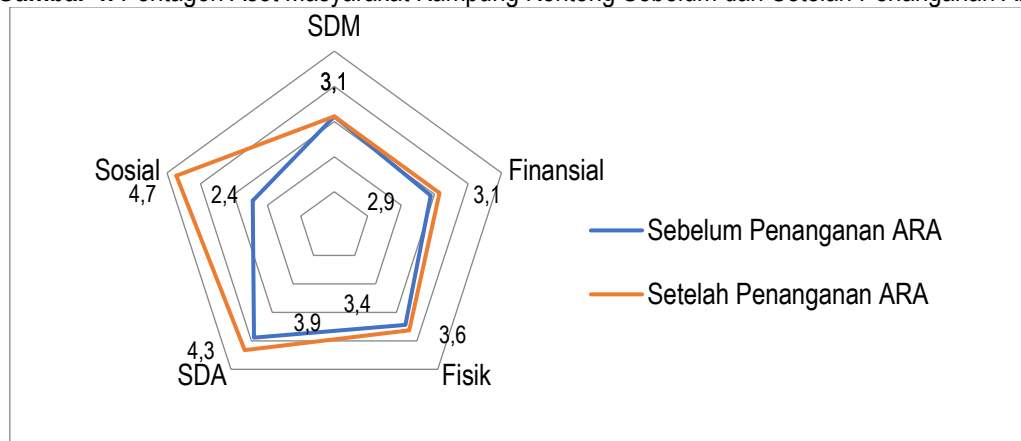


Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2023.

### Dampak Penanganan Akses Reforma Agraria terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Prasetyaningtyas, 2014). Dari data yang diperoleh, kesejahteraan masyarakat di Kampung Kenteng mengalami perubahan dari sebelum adanya Program ARA. Kesejahteraan masyarakat Kampung Kenteng yang dilihat menggunakan aset penghidupan sebelum dan setelah adanya program Penanganan ARA dapat dilihat pada Gambar 4.

**Gambar 4.** Pentagon Aset Masyarakat Kampung Kenteng Sebelum dan Setelah Penanganan ARA



Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2023.

Aset penghidupan masyarakat Kampung Kenteng sebelum adanya Penanganan ARA dominan pada aset sumber daya alam, yaitu dengan skor sebesar 3,9. Sementara, aset paling rendah adalah aset sosial yang memiliki skor sebesar 2,4. Setelah dilakukan ARA, aset penghidupan masyarakat dominan pada aset sosial dengan skor sebesar 4,7. Sementara, aset dengan skor terendah adalah aset sumber daya manusia dan finansial dengan skor sebesar 3,1.

Sementara, aset sumber daya manusia pada masyarakat Kampung Kenteng baik sebelum maupun setelah Penanganan ARA tidak mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat sudah berusia lanjut. Dari sisi pendidikan juga tidak terdapat peningkatan. Sementara, untuk jumlah anggota keluarga dan jumlah anggota keluarga berusia produktif, dalam kurun waktu tersebut, tidak mengalami perubahan. Aset sumber daya manusia di Kampung Kenteng sebesar 3,1 yang menunjukkan bahwa aset sumber daya manusia di lokasi tersebut tergolong tinggi.

Kemudian, aset finansial pada masyarakat Kampung Kenteng sebelum Penanganan ARA, sebesar 2,9. Sementara, setelah adanya Penanganan ARA, aset finansial masyarakat Kampung Kenteng sebesar 3,1. Meskipun pada tahun 2021, ketika dilanda pandemi, aset finansial masyarakat sempat mengalami penurunan, akan tetapi aset ini mengalami peningkatan setelah adanya Penanganan ARA.

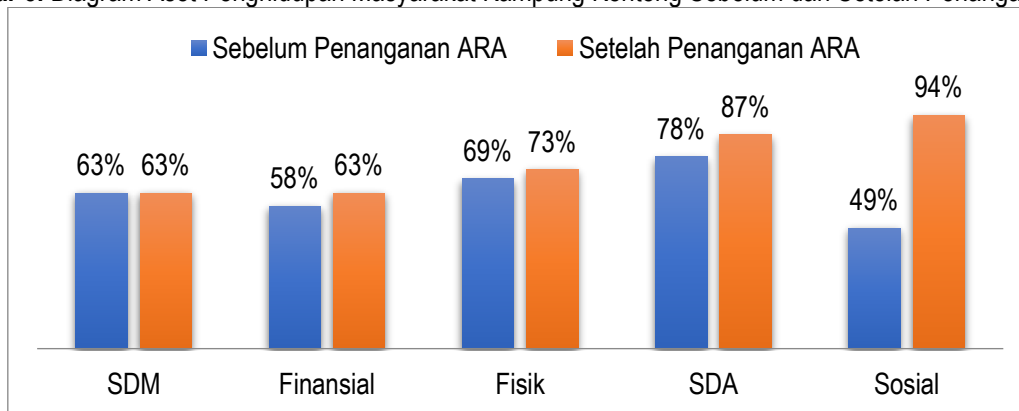
Selanjutnya, aset fisik pada masyarakat Kampung Kenteng sebelum Penanganan ARA sebesar 3,4. Pada tahun 2023, aset tersebut sebesar 3,6 yang menunjukkan peningkatan. Perubahan nilai aset fisik salah satunya dikarenakan adanya program KOTAKU pada tahun 2020 sehingga kualitas lingkungan mengalami peningkatan serta adanya kepemilikan hak masyarakat atas tanah untuk tempat tinggal.

Selain itu, aset sumber daya alam masyarakat Kampung Kenteng sebelum Penanganan ARA sebesar 3,9. Setelah Penanganan ARA, aset ini meningkat menjadi 4,3. Peningkatan terjadi karena kualitas lingkungan yang dilihat dari kebersihan lingkungan di kawasan ini mengalami peningkatan meskipun untuk akses air mengalami penurunan.

Terakhir, aset sosial pada masyarakat Kampung Kenteng sebelum Penanganan ARA sebesar 2,4. Sementara, setelah Penanganan ARA, aset ini mengalami peningkatan menjadi 4,7. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya program pemberdayaan masyarakat dalam Penanganan ARA sehingga aset sosial meningkat dengan lebih aktifnya masyarakat dalam kegiatan bermasyarakat dengan dibentuknya kelompok tani dan kelompok pembudidaya ikan dalam Penanganan ARA.

Adanya Penanganan ARA yang memberikan pelatihan melalui pemberdayaan masyarakat, tidak begitu berpengaruh. Masyarakat tetap melakukan pekerjaannya dan menjadikan kegiatan yang diperoleh dari pelatihan sebagai kegiatan sampingan. Dalam jangka waktu satu tahun setelah adanya Penanganan ARA, perkembangan dari kegiatan belum begitu terlihat sehingga masyarakat dalam berkegiatan masih belum dapat secara keseluruhan mengandalkan pada hasil Penanganan ARA. Adapun dampak Penanganan ARA terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung Kenteng dapat dilihat pada gambar 5.

**Gambar 5.** Diagram Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng Sebelum dan Setelah Penanganan ARA



**Sumber:** Diolah dari Hasil Penelitian, 2023.

Penanganan ARA membawa dampak terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat Kampung Kenteng yang dilihat menggunakan aset penghidupan. Masyarakat Kampung Kenteng tidak mengalami perubahan aset sumber daya manusia dengan adanya Penanganan ARA, yaitu tetap pada persentase 63% (3,1). Aset finansial masyarakat Kampung Kenteng mengalami peningkatan sebesar 5%, yaitu dari 58% (2,8) menjadi 63% (3,1). Aset fisik masyarakat mengalami peningkatan sebesar 4% dari 69% (3,4) menjadi 73% (4). Aset sumber daya alam mengalami peningkatan sebesar 9% dari 78% (3,9) menjadi 87% (4,3). Aset sosial mengalami peningkatan sebesar 46% dari 49% (2,4) menjadi 94% (4,7). Dari perubahan tersebut dapat diketahui bahwa perubahan peningkatan aset penghidupan masyarakat Kampung Kenteng paling tinggi terjadi pada aset sosial. Sementara, aset yang tetap adalah aset sumber daya alam.

Merujuk pada Farrington et al., (2002), aset penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Kenteng menunjukkan bahwa realitas kemiskinan harus dilihat secara multiaspek atau dengan kata lain problem kemiskinan di perkotaan tidak hanya bisa dilihat dari aspek ekonomi semata. Dalam hal ini, mencari jalan keluar dari



kemiskinan artinya tidak bisa dilakukan hanya melalui intervensi pendapatan atau jenis inklusi keuangan. Melalui aset penghidupan, dapat digali lebih jauh strategi program yang bisa diberikan mulai dari: perlindungan sosial (*social protection*), intervensi penghidupan (*livelihood intervension*) ataukah inklusi keuangan (*financial inclusion*).

## KESIMPULAN

Reforma agraria perkotaan melalui program penanganan akses reforma agraria berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kampung Kenteng, Surakarta, Jawa Tengah. Melalui pendekatan aset penghidupan, ditemukan perubahan portofolio aset. Aset penghidupan yang mengalami perubahan yaitu: aset finansial, aset fisik, aset alam dan aset sosial. Aset yang persentasenya mengalami peningkatan yaitu: 1) aset finansial, dari 58% ke 63%; 2) aset fisik, dari 69% ke 73%, 3) aset sumberdaya alam, dari 78% ke 87%, dan 4) aset sosial, dari 49% ke 94%. Sementara itu, yang tidak mengalami perubahan adalah aset sumber daya manusia. Apabila dilihat dari keseluruhan aset, terdapat empat aset yang meningkat dan satu aset yang tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa program penanganan ARA berhasil meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan dapat dilihat dari perubahan atau peningkatan 4 (empat) dari 5 (lima) aset atau sebesar 80% dari total aset penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Kenteng.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka pemberdayaan ekonomi yang menjadi fondasi dasar dari program penanganan akses reforma agraria ternyata memiliki daya ubah pada aspek non ekonomi yaitu aset sosial yang terdiri dari: partisipasi, pemberdayaan dan keamanan lingkungan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa desain penanganan akses reforma agraria dapat didorong untuk tidak semata mengecilkan jangkauan program kepada aspek ekonomi, tetapi bisa diperkaya dan dilengkapi untuk meningkatkan aspek yang berkaitan dengan partisipasi dari subjek atau penerima manfaat program. Potensi program yang mampu menjangkau aspek non ekonomi ini menjadi peluang untuk dilanjutkan pada riset-riset berikutnya.

Keterbatasan studi ini belum secara khusus melakukan pendalaman pada aspek non ekonomi berkaitan dengan penanganan akses reforma agraria di perkotaan. Aspek non ekonomi perlu diulas pada riset-riset berikutnya termasuk juga mempertimbangkan karakteristik kelompok rentan seperti rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan atau rumah tangga yang tidak memiliki lelaki dewasa. Dengan memperluas karakteristik subjek, akan diketahui jangkauan program ini pada keberadaan kelompok rentan di perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aranda-Jan, C., Afia, R., Pitcher, S., & Sibthorpe, C. (2020). *The Department for International Development (DFID), for the benefit of developing countries. The views expressed are not necessarily those of DFID.*
- Arisaputra, M. I. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Astuti, P. K., & Asnawi. (2014). Perencanaan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Banyumanik. *Jurnal Teknik PWK*, 3(4), 895–907.
- Augustina, P. H., Pujiriyani, D. W., & Farid, A. H. (2024). Perubahan Profil Kemiskinan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Pendekatan Aset Penghidupan. *Widya Bhumi*, 4(1), 55.
- Buckley, R., & Kalarickal, J. (2005). Housing Policy in Developing Countries: Conjectures and Refutations. *The World Bank Research Observer*, 20(2), 233–257.
- Dinanti, D., Wijayanti, W. P., & Taufiq, A. R. (2015). Keberlanjutan Livelihood Asset Pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 7(2).
- Ekawati, E. (2021). *Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Permukiman Kumuh di Provinsi Indonesia*. Universitas Sriwijaya.
- Ellis, F. (1999). Rural Livelihood Diversity in Developing Countries: Evidence and Policy Implications. *Overseas Development Institute, London*, 40.
- Ellis, F. (2004). Occupational diversification in developing countries and implications for agricultural policy. *Hot Topic Paper-Programme of Advisory and Support ...*, December, 1–28.
- Farahdina, D., & Purnama, D. (2022). Konsolidasi Tanah Kawasan Permukiman Kumuh Tepi Sungai di Badur Bawah. *JAUR (Journal of Architecture and Urbanism Research)*, 6(1), 61–69.
- Farrington, J., Ramasut, T., & Walker, J. (2002). *Sustainable Livelihoods Approaches in Urban Area: General Lessons with Illustrations from Indian Case Studies*.
- Gai, A. M., Poerwati, T., Maghifrah, F., & Sir, M. M. (2020). Analysis of Sustainable Livelihood level and its Influence on Community Vulnerability of Surumana Village, Central Sulawesi. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(32), 209–220.
- Hastutiningsih, N., Pujiriyani, D. W., & Rineksi, T. W. (2023). Dampak Program Penanganan Akses Reforma Agraria Terhadap Kondisi Penghidupan Masyarakat Pesisir Desa Ambulu. 18(April), 53–77.

- Iskasari, Y. K., Dinanti, D., & Hidayat, A. T. (2020). Livelihood Assets Masyarakat Pengrajin Sentra UMKM Kampung Logam Desa Ngingas Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 9(1), 29–36.
- Kamil, R. N., Ningrum, S., & Buchori, A. (2021). Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Oleh Satuan Kerja Kota Di Kota Bandung. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 36–40.
- Kamim, A. B. M. (2022). Reforma Agraria di Perkotaan, Usaha Mencari Bentuk: Kasus Jakarta, Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2), 151–165.
- Krantz, L. (2001). *The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction*. Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).
- Kurnia, A., & Insani, S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 43–61.
- Lasaiba, M. A. (2022). Perkotaan dalam Perspektif Kemiskinan, Permukiman Kumuh dan Urban Heat Island (Suatu Telaah Literatur). *Geoforum*, 1(2), 2–11.
- Mulyani, L. (2012). Reforma Agraria Perkotaan di Surakarta: Konsep, Mekanisme, dan Implementasi. In *Mempertanyakan Kesenambungan: Analisis Hukum dan Kelembagaan Pilot Project Reforma Agraria* (pp. 45–65). PMB - LIPI.
- Natadireja, R. R., Ningrum, S., & Pancasilawan, R. (2024). Dynamics Of Indonesian Agricultural Policy From 1945-2022. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(7), 5642–5664.
- Payne, G., & Durand-Lasserve, A. (2013). *Holding On: Security of Tenure – Types, Policies, Practices and Challenges* (Research Paper Commissioned by the Special Rapporteur on the Right to an Adequate Standard of Living for an Expert Group Meeting on Security of Tenure).
- Pradnyaswari, I. C., Wijayanti, W. P., & Subagiyo, A. (2022). Tingkat Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Desa Purwakerti Kabupaten Karangasem. *Planning for Urban Region and Environment*, 11(3), 135–146.
- Prasetyaningtyas, P. (2014). Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan. *Jlmfeb*.
- Rachmasari, R., Herlambang, S., & Santoso, S. (2021). Penataan Kampung Guji Baru dengan Konsep Konsolidasi Tanah Vertikal. *Jurnal Stupa*, 3187–3202.
- Rachmawati, L., & Latifa, A. (2020). Lintasan Penghidupan (Livelihood Trajectories) dan Migrasi Lingkungan Di Delta Mahakam. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(1), 103.
- Saragih, S., Lassa, J., & Ramli, A. (2007). Kerangka Penghidupan Berkelanjutan Sustainable Livelihood Framework. In *Hivos–Circle Indonesia*.
- Scoones, I. (2015). *Sustainable livelihoods guidance sheets*. Practical Action Publishing Ltd.
- Simanjuntak, D. N. (2022). Analisis Karakteristik Lingkungan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan. *Jurnal Samudra Geografi*, 5(1), 10–21.
- Suartina, T., Mulyani, L., & Ocktaviana, S. (2012). Pelaksanaan Program Penataan Aset (Tanah dan Bangunan) dan Akses Masyarakat Miskin di Kota Surakarta. In *Mempertanyakan Kesenambungan: Analisis Hukum dan Kelembagaan Pilot Project Reforma Agraria di Kota Surakarta* (pp. 69–98). PMB - LIPI.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Alfabeta.
- Tsuroyya, I. (2022). *Analisis Dampak Gentrifikasi Pembangunan Perkotaan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Peri-Urban di Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon*. AIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Wasita, A. (2022). Pemkot Surakarta komitmen kurangi wilayah kumuh perkotaan. *Antaraneews.Com*. <https://www.antaraneews.com/berita/2804701/pemkot-surakarta-komitmen-kurangi-wilayah-kumuh-perkotaan>
- Wigati, S., & Fitrianto, A. R. (2013). Pendekatan Sustainable Livelihood Framework Dalam Rangka Membongkar Dominasi Tengkulak Melalui Kegiatan Keagamaan: Study Kasus Pada Pendampingan .... *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi ....*, XIV(2), 283–310.
- Wijaya, G. P., Silviana, A., & Triyono. (2016). Praktik Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Alternatif Model Pembangunan Wilayah Perkotaan Tanpa Pembebasan Tanah. *Diponegoro Law Review*, 1–18.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).